

2014, PU Butuh Anggaran Rp 110T

Oleh Eko Adityo Nugroho

► JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan anggaran sebesar Rp 85-110 triliun pada 2014 guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 7-7,7% pada tahun depan. Total kebutuhan anggaran infrastruktur 2014 diperkirakan Rp 529,2-740,8 triliun dengan asumsi produk domestik bruto (PDB) di kisaran US\$ 1-1,2 triliun.

"Dari jumlah tersebut, anggaran Kementerian PU diharapkan Rp 85-110 triliun dengan catatan kementerian harus dapat meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pembangunan dibanding tahun sebelumnya," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat konferensi pers yang bertajuk *Konsultasi Regional Kementerian PU*, di Jakarta, Selasa (26/2).

Menurut Djoko, peningkatan anggaran tersebut juga untuk mendukung pencapaian target-target proyek pembangunan infrastruktur sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU tahun 2014. Dia mencontohkan, target kondisi jalan mantap 100%, hanya bisa direalisasikan dengan menambah anggarannya.

Saat ini, beberapa program Kementerian PU telah sesuai target rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), seperti pembangunan embung atau situ. Namun di sisi lain, kata dia, masih ada program kerja yang belum sesuai target, seperti pembangunan waduk yang menjadi tanggung jawab Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU.

"Dari target 11 waduk yang harus dibangun, saat ini baru terealisasi tiga waduk, sedangkan sisanya masih dalam proses pembangunan," ujar Djoko.

Selain itu, saat ini pemenuhan kebutuhan air baku dan minum baru terealisasi 56% dari target 67%. Direktur Pengelolaan Air Minum Ditjen Sumber Daya Air Danny Sutjiono meng-

akui masih ada perusahaan daerah air minum (PDAM) yang belum sehat. Dari 341 PDAM yang sudah diaudit, baru ada 144 PDAM sehat, dan sisanya kurang sehat serta sakit.

Djoko menambahkan, di lingkup Ditjen Bina Marga, program yang belum optimal adalah pembangunan tol Trans-Jawa. Sembilan ruas tol Trans-Jawa yang ditargetkan terhubung seluruhnya pada 2014 dipastikan tidak terealisasi. Hal itu karena ada tiga ruas tol, yakni Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang, yang tidak tuntas pengerjaannya akibat persoalan pembebasan tanah.

"Kami harus realistis, tol Trans-Jawa sulit diselesaikan pada akhir 2014," kata Djoko.

Sedangkan proses pengerjaan ruas tol Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya relatif ada perkembangan. Sedangkan pengerjaan ruas tol Surabaya-Gempol sedikit terkendala masalah lumpur Lapindo, tetapi sudah bisa diatasi. Kemudian, tol Gempol-Pasuruan seksi satu bisa dibangun karena lahannya sudah dibebaskan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Agoes Widjanarko sebelumnya mengatakan, tahun ini anggaran Kementerian PU sebesar Rp 79,55 triliun. Anggaran tersebut termasuk dana tambahan sebesar Rp 1,57 triliun untuk pembangunan infrastruktur di tiga wilayah, yaitu Madura, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

"Anggaran tersebut akan dialoka-

sikan untuk mendukung ketahanan pangan di Madura dan sektor peternakan di NTT, serta pembangunan infrastruktur jalan di Papua," ujar Agoes.

Pasar Modal

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Ekonomi dan Investasi Setiabudi Algamar mengungkapkan, kekurangan pendanaan infrastruktur dapat dipenuhi dari pasar modal. Bahkan, jumlah pendanaan dari pasar modal berpotensi melebihi dana dari APBN dalam jangka panjang, atau pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya mengandalkan APBN.

Setiabudi mengatakan, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia baru bisa dipenuhi dari APBN dan APBD sebesar 30% dari keperluan pendanaan infrastruktur 2010-2014.

"Kebutuhan dana infrastruktur kita masih banyak sekali," kata dia kepada *Investor Daily* baru-baru.

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur berpatokan pada rata-rata minimal 5% dari pendapatan domestik bruto tahun 2010-2014 mencapai 1.924 triliun. Pemerintah saat ini baru bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur sekitar Rp 560 triliun. Potensi pendanaan lain dari investasi BUMN, swasta, dan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai Rp 1.041 triliun. Namun apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan minimal 7% pada akhir 2014, masih terdapat kekurangan pembiayaan sekitar Rp 323 triliun.

Pemerintah, lanjut dia, saat ini terus menggenjot kebutuhan pendanaan infrastruktur melalui APBN/APBD, perusahaan negara, pembiayaan swasta murni maupun kerja sama pemerintah dan swasta. Selain itu, pembiayaan berasal dari obligasi (*bond*) yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Khusus untuk obligasi, lanjut dia, saat ini sedang digencarkan melalui indeks SMinfra 18 di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dicetuskan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

"*Bonds* ini bukannya tidak berprospek, melainkan cukup potensial untuk pembiayaan infrastruktur," ujar dia.